

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya aspirasi-aspirasi politik baru dalam suatu masyarakat, yang disertai dengan kebutuhan terhadap partisipasi politik lebih besar, dengan sendirinya menuntut pelembagaan sejumlah saluran baru, diantaranya melalui pembentukan partai politik (parpol) baru. Tetapi pengalaman di beberapa negara dunia ketiga menunjukkan, pembentukan partai baru tidak akan banyak bermanfaat, kalau sistem kepartaiannya sendiri tidak ikut diperbaharui.

Saat ini terdapat ruang lingkup yang luas dan signifikan dalam perdebatan-perdebatan politik. Banyak ulama dan intelektual membahas berbagai aspek pemikiran politik. Para pemikir yang membahas antara Islam dan politik biasanya tertarik untuk mengetahui ilmu pengetahuan politik macam apa yang diberikan oleh Islam, apakah Islam mendukung filsafat politik atau mengadopsi suatu ideologi politik tertentu atau apakah sumber-sumber Islam mendukung suatu bentuk suatu sistem politik tertentu.¹

¹ Ahmad Vaezi, *Agama Politik; Nalar Politik Islam*, alih bahasa Ali Syahab, cet. Ke-1 (Jakarta : Citra, 2006) h. 61

Dalam perspektif Islam, politik adalah suatu metode ijtihad dalam upaya menangani masalah umat dengan seperangkat undang-undang untuk menegajawantahkan kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan umat.² Partai politik dalam Islam adalah sekumpulan orang yang beraqidah dan berpemikiran yang sama untuk melakukan aktifitas dalam menjawab seruan Allah.³

Dengan demikian partai politik Islam dapat diartikan sebagai sebuah partai yang menonjolkan asas Islam dalam basis ideologi dan sosialnya, yakni menggunakan simbol dan idiom Islam sebagai acuan utama dalam memperjuangkan goal politik, interest dan termasuk dalam merebut pemilihnya.⁴ Sebenarnya ada lima kriteria yang dapat diajukan untuk mengenali sebuah partai politik Islam, yaitu dari nama, asas, tanda gambar, tujuan dan program, dan konsituennya.⁵

² Salim Alim al Bahansawi, *Wawasan Sistem Politik Islam*, alih bahasa Mustolah Maufar (Jakarta: pustaka al Kautsar, 1995), h. 23

³ <http://www.angelfire.com/de/assalam008.html>, akses 20 September 2015

⁴ www.hamline.eu/apakabar/barisdata/1999/04/04/0048.html, akses 28 September 2015

⁵ Arskal Salim, *Partai Islam dan Relasi Agama-Negara*, (Jakarta: Pusat Penelitian IAIN Jakarta, 1999), h. 8.

Suatu sistem kepartaian baru disebut kokoh dan adaptabel, kalau ia mampu menyerap dan menyatukan semua kekuatan sosial baru yang muncul sebagai akibat modernisasi. Dari sudut pandang ini, jumlah partai hanya akan menjadi penting apabila ia mempengaruhi kapasitas sistem untuk membentuk saluran-saluran kelembagaan yang diperlukan guna menampung partisipasi politik. Sistem kepartaian yang kokoh, sekurang-kurangnya harus memiliki dua kapasitas, pertama melancarkan partisipasi politik melalui jalur partai, sehingga dapat mengalihkan dan mengantisipasi segala bentuk aktifitas politik anomik dan kekerasan. Kedua, mencakup dan menyalurkan partisipasi sejumlah kelompok yang baru dimobilisasi, yang dimaksudkan untuk mengurangi kadar dan tekanan kuat yang dihadapi oleh sistem politik.⁶ Dengan demikian, sistem kepartaian yang kuat menyediakan organisasi-organisasi yang mengakar dan prosedur yang melembaga guna mengasimilasikan kelompok-kelompok baru ke dalam sistem politik.

Dari segi jumlah, sejak kemerdekaan hingga kini, Indonesia telah mengenal dua sistem kepartaian. Pada masa Demokrasi Parleментар (1945-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1965),

⁶ Fitri Yulianti, "*Partai Politik di Indonesia*," <http://ppmi.tripod.com/Mahasiswa.html>, akses 28 September 2015

yang dianut adalah sistem multipartai. Setelah tiga bulan masa kemerdekaan Soekarno dan Hatta sudah berencana untuk menyelenggarakan pemilu pada awal tahun 1946, meski pada praktiknya pemilu tersebut baru dapat diselenggarakan sepuluh tahun kemudian yaitu pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan yang kedua pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih Dewan Konstituante. Pemilu 1955 ini merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia, dalam Pemilu ini diikuti oleh 30-an Parpol. Namun hanya terdapat lima partai politik Islam yang ikut berkompetisi yaitu: Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), Partai Syarikat Islam Indonesia (Perti), Partai Poltik Tarikat Islam (PPTI).

Pemilu kedua baru bisa diselenggarakan tanggal 5 Juli 1971, yang berarti setelah 4 tahun pak Harto menduduki jabatan kepresidenan, pada waktu itu ketentuan tentang kepartaian (tanpa UU) kurang lebih sama dengan yang diterapkan Presiden Soekarno.⁷ Setelah 1971, pelaksanaan Pemilu yang periodik dan teratur mulai terlaksana, pemilu ketiga diselenggarakan 6 tahun lebih setelah Pemilu 1971 yakni tahun 1977, setelah itu selalu terjadwal sekali

⁷ “*Sejarah Pemilu di Indonesia,*” www.kpu.go.id, akses 29 September 2015

dalam lima tahun. Dari segi jadwal sejak itulah pemilu teratur dilaksanakan.

Satu hal yang menarik adalah bahwa sejak Pemilu 1977 sampai dengan Pemilu 1997 hanya tiga Parpol yang ikut serta dalam arena pentas Demokrasi, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia dan Golongan Karya. Ini semua disebabkan pihak pemerintah dan DPR mengeluarkan UU No. 3 Tahun 1975, guna dalam upaya penyederhanaan jumlah Partai.

Pada masa pemerintahan Soeharto timbul berbagai macam bentuk resistensi politik yang akhirnya melahirkan Reformasi, pada titik inilah banyak partai baru bermunculan dan meramaikan kancah politik Indonesia, Soeharto dilengserkan dari kursi kepresidenan dan digantikan oleh Bachruddin Jusuf Habibie, usia kepemimpinan Presiden Habibie pun tak lama, hanya sekitar 13 bulan.

Pada tahun 1999 Presiden membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang anggota-anggotanya adalah wakil dari parpol dan dari pemerintah, satu hal yang sangat menonjol membedakan Pemilu 1999 ini diikuti oleh banyak sekali peserta, ini dimungkinkan karena adanya kebebasan untuk mendirikan Parpol. Peserta pemilu kali ini adalah 48 partai, dan dari 48 partai peserta Pemilu tersebut

tercatat ada 12 Partai Islam, yaitu: Masyumi Baru, PSII, Partai Suni, Masyumi, PKU, PSII, PNU, Partai Keadilan, PBB, PAN, PKB, PPP.⁸

Dinamika politik terus bergulir yang dilancarkan lewat berbagai kanal-kanal organisasi formal dan informal, setidaknya lewat pemilu setiap kelompok organisasi modern (parpol) melancarkan berbagai partisipasi politiknya baik dari kubu nasionalis, maupun Islamis sendiri. Ini semua terbukti dari pemilu pertama pada tahun 1955 sampai dengan pemilu 2004-2009, dan 2009-2014 beberapa partai politik berbasis Islam masih dapat mempertahankan eksistensinya dan ikut berkontestasi, meskipun sebagiannya tergerus oleh arus demokrasi yang semakin ketat. Sementara itu Pemilu berikutnya, tepatnya pada 2014-2019 hanya empat parpol Islam yang lolos verifikasi KPU yang diantaranya adalah Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan.⁹

Dari kenyataan di atas menunjukkan bahwa Partai Islam telah menjadi bagian dalam perjalanan demokrasi negara ini. Namun

⁸ “*Sejarah Pemilu di Indonesia*,” www.kpu.go.id, akses 29 September 2015

⁹ <http://www.voaindonesia.com/>, akses pada 29 September 2015

demikian, tidak semua Partai Islam menyatakan diri mereka sebagai partai Islam. Semisal Partai Amanat Nasional dan Partai Kebangkitan Bangsa Kedua Partai tersebut tidak berasaskan Islam, akan tetapi bila dilihat dari platform, figur, dan basis massa kedua partai tersebut adalah berlatar belakang Islam. Garis besarnya partai Islam yang didirikan oleh tokoh-tokoh umat Islam dapat diklasifikasikan kedalam kelompok besar. Pertama, partai yang menjadikan Islam sebagai asas dan program formal. Kedua, partai yang mementingkan mengembangkan nilai-nilai Islam dari pada simbol-simbol Islam.¹⁰

Hal ini membawa pemahaman bahwa dalam politik kontemporer dikenal adanya polarisasi pemikiran. Polarisasi pemikiran ini berawal dari pemahaman yang berbeda terhadap ajaran Islam tentang politik dan konsep kenegaraan atau pemerintahan.

Berdasarkan pemahaman di atas maka penulis ingin meneliti konsep pemikiran politik Islam yang dimunculkan oleh partai-partai Islam peserta Pemilu 2014-2019.

¹⁰Abdurahman Wahid, dkk, *Mengapa Partai Islam Kalah?*, h. 18.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana tipologi politik Partai Islam di Indonesia pada konstelasi Pemilu 2014-2019 ?
2. Bagaimana polarisasi pemikiran politik Partai Politik Islam di Indonesia pada konstelasi Pemilu 2014-2019 ?
3. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap Partai Politik Islam pada Pemilu 2014-2019 ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui tipologi politik partai-partai Islam di Indonesia
2. Mengetahui tentang polarisasi pemikiran politik partai Islam di Indonesia
3. Mengetahui Pandangan Masyarakat terhadap Partai Politik Islam yang berkontestasi pada Pemilu 2014-2019.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini merupakan kontribusi sederhana bagi wacana politik Islam.
2. Penelitian ini akan bermanfaat bagi setiap orang yang mempunyai ketertarikan pada wacana politik Islam, lebih khusus lagi mengenai partai politik Islam.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data-data dengan menjadikan pustaka sebagai landasan sumber utama (*primer*). Artinya, data yang berasal dari sumber-sumber kepustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, surat kabar dan lain sebagainya yang berkaitan dengan topik penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan penyusun dalam penyusunan skripsi ini adalah prespektif analisis, yaitu jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek ilmiah tertentu dengan jalan memilih antara pengertian yang satu dengan pengertian-pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan hal yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Karena ini adalah penelitian kepustakaan dengan mengambil titik pembahasan pada karakteristik pemikiran

politik Islam yang digunakan oleh beberapa partai Islam di Indonesia maka pengumpulan datanya adalah dengan menelusuri buku-buku serta tulisan yang menyangkut dengan obyek yang akan diteliti, disamping itu ditelusuri serta dikaji pula buku-buku dan tulisan-tulisan yang mendukung kedalaman dan ketajaman analisis.

Data primer dari penelitian ini adalah berupa tulisan-tulisan yang berkaitan dengan obyek penelitian seperti *Profil Partai Politik Peserta Pemilu 2014*, Tim Divaro Yugha (Jakarta: Erlangga, 2016), *Islam Yes, Partai Islam Yes*, Lili Romli (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006), AD/ART partai-partai politik yang menjadi objek penelitian.

Sedangkan data sekunder penelitian ini adalah hasil wawancara terhadap koresponden yang paling representatif dalam bidang politik Islam.

F. Penelitian Yang Relevan

Partai-partai politik Islam peserta pemilu 2014 merupakan wajah lama perpolitikan Indonesia, kehadiran partai-partai politik Islam cukup menarik perhatian dari berbagai kalangan sehingga

dengan mudah dijumpai karya, baik buku maupun skripsi yang membahas tentang pemikiran politik partai-partai Islam di Indonesia, meskipun karya tersebut masih sebatas gambaran umum tentang partai-partai tersebut.

Beberapa karya tersebut ada yang berbentuk buku dan ada juga yang berbentuk karya tulis. Dalam bentuk buku misalnya *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, karya ini mencoba melakukan penelusuran atas berbagai pemikiran Islam dan praktik politik Islam yang berkembang di Indonesia dalam hubungannya dengan Negara, serta kemungkinan-kemungkinan terjadinya hubungan politik harmonis antara Islam dan Negara.

Sedangkan karya berbentuk skripsi misalnya dapat dijumpai dalam skripsi Fadlon yang berjudul *Partai Politik Islam Di Indonesia Studi Atas Pemikiran Kuntowijoyo*, yang lebih cenderung membahas pemikiran kuntowijoyo tentang pendirian partai politik Islam. Kemudian skripsi Arisandi yang berjudul *Kegagalan Politik Islam (Telaah Terhadap Partai Masyumi)*, yang merupakan tentang kegagalan Masyumi 1945 dalam memenangkan pemilu dan merealisasikan tuntutan partai.

Penelitian ini nantinya akan secara khusus mengkaji tentang tipologi Partai Politik Islam yang menjadi kontestan pemilu 2014, polarisasi dan pandangan masyarakat terhadap partai politik Islam tersebut.

G. Kerangka Pemikiran

Realitas sejarah Islam menunjukkan bahwa Negara itu dibutuhkan dalam rangka pembangunan dakwah, terdapat beberapa klasifikasi mengenai hubungan antara Agama dan Negara dalam Islam. Setidaknya terdapat tiga golongan yang mewarnai klasifikasi pakar Islam masa kontemporer mengenai konsepsi Negara dalam Islam.

Pendapat pertama menyangkut bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap dengan peraturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan berpolitik dan bernegara. Golongan ini menyatakan bahwa dalam bernegara umat Islam tidak perlu meniru sistem ketatanegaraan Barat, tetapi sebaliknya hendak kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam.

Golongan kedua berpendirian bahwa Islam adalah sebagai suatu agama, sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah politik dan kenegaraan. Golongan ketiga mengatakan bahwa Islam

merupakan ajaran totalitas tetapi dalam petunjuk-petunjuk pokok saja. Oleh karena itu menurut golongan ini, terdapat tata nilai dan etika bagi kehidupan bernegara.¹¹

Melihat kenyataan bahwa terdapat teori-teori di masa klasik dan pertengahan menunjukkan bahwa pemikiran mengenai hubungan Agama dan Negara telah berkembang dan memang benar-benar ada, sejalan dengan hal ini Fajrul Rahman mengatakan bahwa antara Agama dan Politik tidak dapat dipisahkan.¹²

Sejalan dengan hal itu dalam merefleksikan realitas hubungan Agama dan Negara terdapat visi yang berbeda yang diungkapkan para pemikir modern. Oleh karena tidak adanya larangan dalam Islam mengenai hal ini. Lebih jauh lagi mengenai proyek demokrasi lebih menyeret jauh realitas Agama dan Negara.

Dalam sejarah politik Islam di Indonesia segmentasi Islam dalam dimensi politik terdapat persaingan antara partai-partai Islam dalam mempromosikan ideologi mereka masing-masing agar mendapat dukungan politik dari umat Islam demi cita-cita sektarian.

Dari kenyataan itu, sistem multipartai yang dianut oleh Indonesia membawa dampak pada banyaknya jumlah Partai

¹¹Munawir Sadjali, *Islam Dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UII Pres, 1999) h. 1-2

¹² Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam menurut Fajlur Rahman*, (Jakarta: UII Press, 2000), h. 80

kontestan Pemilu sebagai bentuk pentas demokrasi. Dari sekian banyak partai tersebut, terdapat beberapa Parpol yang mengatasnamakan Islam (Agama) sebagai ideologi partai.

Adapun konstruksi realitas Agama dan Demokrasi di Indonesia itu sendiri terbagi dalam beberapa tipologi. Tipologi Partai Politik sendiri ialah pengklasifikasian berbagai Partai Politik berdasarkan kriteria tertentu, seperti asas dan orientasi, komposisi dan fungsi anggota, basis sosial dan tujuan. Klasifikasi ini cenderung bersifat tipe ideal karena kenyataan sepenuhnya tidak demikian.¹³

Pada masa Orde Baru telah banyak peneliti yang melakukan penelitian tentang tipologi pemikiran politik Islam di Indonesia, seperti Din Syamsudin, Bachtiar Effendy dan Syafi'i Umar. Selanjutnya sebagai implementasi adanya hubungan Agama dan Politik dalam demokrasi Indonesia Din Syamsudin mengelompokkan pemikiran politik Islam di Indonesia masa Orde Baru menjadi tiga aliran;

1. Formalistik, yang cenderung mempertahankan bentuk-bentuk prakonsepsi politik Islam, misalnya pentingnya partai Islam yang formal menggunakan nama Islam, simbol-simbol dan

¹³Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta; PT Gramedia Widisarana Indonesia, 1992), h. 121.

ungkapan serta idiom-idiom Islam dan landasan organisasi secara konstitusional Islam,

2. Subtantivistik, yang menekankan pentingnya pada makna substantiasial dan menolak bentuk formalistik. Mereka menekankan pada tuntutan manifestasi nilai-nilai Islam dalam aksi politik, bukan kelembagaan.
3. Fundamentalisme, yang cenderung mengangkat kembali sendi-sendi Islam kedalam realitas politik sekarang.¹⁴

Dengan melihat kenyataan diatas, penulis ingin mencoba melihat sejauh mana pengejawantahan relasi antara Agama dan Politik yang ditawarkan oleh para elit politik dengan melihat tipologi partai politik Islam Kontestan Pemilu 2014, yang telah dikelompokkan oleh Din Syamsuddin diatas.

H. Sistematika Penulisan

Setiap karya ilmiah tidak terlepas dari pembahasan. Agar pembahasan dapat berurutan dan sistematis, ditempatkan setiap babnya sesuai dengan tingkat urgensinya. Karena demikian akan memudahkan perincian tujuan penyusunan.

¹⁴ M. Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, (Tangerang: Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 217

Pada Bab pertama berisi tentang : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Langkah-langkah Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua: Gambaran Umum Partai Politik Islam Di Indonesia dari pra kemerdekaan hingga reformasi. Lahirnya partai-partai Islam, sejarah Pemilu hingga perkembangan politik Islam secara global ke-Indonesiaan.

Bab ketiga: Menjelaskan Partai-partai besar Islam dan yang masih eksis di Indonesia dan berkontestasi pada Pemilu 2014, pembahasan akan menjurus kepada sejarah lahirnya partai-partai tersebut, lalu tujuan yang ingin dicapai dari pendirian partai tersebut, juga memberikan penjelasan tentang pemikiran politik Islam partai-partai tersebut.

Bab keempat: Analisis Terhadap Pemikiran Politik Islam Partai-Partai Islam Di Indonesia Kontestan Pemilu 2014. Disini penulis akan mencoba memaparkan hasil pemetaan atas pemikiran politik Islam di Indonesia pasca Orde Baru dengan meneliti konsep pemikiran politik Islam yang dimunculkan oleh partai-partai Islam peserta pemilu 2014. Dan bagaimana respon dan tanggapan masyarakat dengan kehadiran Partai Politik Islam.

Bab kelima: Kesimpulan dan Saran-saran.